

# PEMBERITAAN MEDIA



**LULUK'S UPDATE**

**EDISI**  
**Minggu IV Februari 2020**

*MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN  
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI*



# Perubahan Iklim

# Komitmen dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim 2030

Direktur Jenderal PPI KLHK mengatakan Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi kepada dunia terkait pengendalian perubahan iklim pada 2030 dalam upaya pencegahan kenaikan temperatur dua derajat celsius.

Komitmen tersebut pada hakikatnya telah disampaikan pula dalam "Nationally Determined Contribution" atau kontribusi yang ditentukan secara nasional. Hal tersebut merupakan bagian penting dari "Paris Agreement" atau perjanjian Paris yang telah diratifikasi Indonesia pada 2016.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan mata pencaharian serta ketahanan ekosistem dan lansekap. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah terkait komitmen tersebut melalui penyiapan regulasi serta implementasi program-program langsung di tingkat tapak termasuk Program Kampung Iklim.

# Komitmen dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim 2030

Tantangan utamanya adalah membumikan bahasa perubahan iklim sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas.

Saat ini, pemerintah terus melakukan pengarusutamaan dan integrasi perubahan iklim serta kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan baik di nasional maupun daerah.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden 18 tahun 2020 merefleksikan perhatian pemerintah yang besar pada isu perubahan iklim. Ini dapat dilihat dari salah satu babnya yang secara khusus membahas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Upaya pengendalian perubahan iklim tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja, memerlukan peran swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan masyarakat. Kerja sama bilateral dan multilateral juga digalang.

# Laporan NDC

KLHK akan melaporkan kondisi terkini terkait upaya penurunan emisi sebagai Nationally Determined Contribution atau NDC di Indonesia pada Maret 2020.

Konsultasi publik perlu digelar agar mendapat pandangan langsung dari pakar atas rencana pelaporan pengurangan emisi.

Pemerintah berharap akan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan tentang dokumen terkini NDC serta meningkatkan kepedulian dan pemahaman terhadap komitmen bersama dalam implementasi NDC.

Indonesia Siapkan Laporan  
Upaya Pengurangan  
Penurunan Emisi

# Laporan NDC

Target NDC yang sudah disampaikan pada 2016, yakni penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK sebesar 29 persen sampai dengan 41 persen pada 2030, tidak berubah.

Hal itu mengingatkan masih besarnya tantangan untuk memenuhi kondisi yang harus dicapai. Misalnya, target laju deforestasi kurang dari 0,45 - 0,325 Mha/tahun pada 2030 dan target RHL 800,000 ha/tahun dengan survival rates sebesar 90 persen.

Belum lagi, tantangan untuk pemenuhan komitmen bauran energi 23 persen pada tahun 2025, penerapan clean coal technology-CCT sebesar 75 persen di sub sektor ketenagalistrikan (batu bara), dan juga implementasi PLTSa di tujuh kota masih terkendala.

Indonesia Siapkan Laporan  
Upaya Pengurangan  
Penurunan Emisi

# Laporan NDC

Indonesia Siapkan Laporan  
Upaya Pengurangan  
Penurunan Emisi

"NDC walau secara angka tidak menaikan target tapi dalam update nanti akan ada langkah dan upaya nyata yang kita sampaikan. Untuk itu kami berharap masukan semua pihak untuk mempertajam lagi sehingga target yang kita canangkan tercapai"

Dirjen PPI KLHK, 18 Februari 2020

# Laporan NDC

Level NDC di Indonesia dalam tiga tahun ini sudah dalam tahap aman. Namun, adanya kebakaran lahan dan hutan atau karhutla pada 2018 dan 2019 menyebabkan NDC kembali turun.

KLHK terus melakukan komunikasi pada lima sektor utama yakni kehutanan, energi, limbah, IPPU, dan pertanian dalam mencapai target NDC.

Jika karhutla sudah di bawah 15.000 maka posisi NDC aman. Namun, saat ini Karhutla masih di atas 500.000 sehingga upaya pengurangan dan pencegahan ke depan yang lebih utama. Namun, saat ini Riau juga sudah lebih siap dan siaga terhadap karhutla.

Indonesia Siapkan Laporan  
Upaya Pengurangan  
Penurunan Emisi



# Laporan NDC

Indonesia Siapkan Laporan  
Upaya Pengurangan  
Penurunan Emisi

"Jadi kalau tidak ada karhutla kemarin NDC kita 29 yang sudah turun menjadi 24 menjadi turun lagi sekitar 15 persen, angkanya terus fluktuasi, itu pun dari karhutla 2019 juga belum ada angka final"

Dirjen PPI KLHK, 18 Februari 2020

# Laporan NDC

Dalam dokumen yang dimasukkan Maret nanti, upaya konkrit yang akan dilakukan antara lain menghitung potensi penyerapan karbon oleh mangrove yang terbukti dapat menyerap hingga tujuh kali dari hutan mineral. Sisi lain KLHK berharap, B30 akan berlanjut menjadi B50 pada 2025 untuk selanjutnya menjadi B100.

KLHK telah memberikan masukan pada Kementerian terkait agar memberikan insentif yang menarik untuk pelaku usaha. Sementara dari 29 persen NDC di Tanah Air, 17,2 persen berasal dari sektor kehutanan dan 11 persen energi sektor lain hanya kurang dari 1 persen.

Jadi Kementerian ESDM yang utama, mungkin bisa memberikan insentif untuk pelaku usaha supaya komitmen yang sudah kita sampaikan pada global ini benar-benar dijalankan

Indonesia Siapkan Laporan  
Upaya Pengurangan  
Penurunan Emisi

# Lingkungan Hidup

# Enam Isu Utama KLHK

## 6 isu utama Program KLHK

1. memperkuat ekonomi nasional, investasi dan ekspor melalui deregulasi perizinan yang menghambat. Kemudian pemberian insentif hingga kepastian hukum.
2. melakukan pengentasan kemiskinan melalui perhutanan sosial, TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dan pendampingan usaha pada kelompok masyarakat dan kelompok tani hutan mandiri.
3. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan melalui rehabilitasi DAS, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta restorasi lahan gambut
4. pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat.
5. penguatan pendidikan vokasional untuk menghasilkan SDM yang siap kerja.
6. penguatan program yang menyerap tenaga kerja masyarakat dalam jumlah besar.

Dalam prioritas nasional, KLHK mendapatkan mandat dalam pengentasan kemiskinan, pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial.

Dalam Rapat dengan Komite II DPD, Menteri LHK menyampaikan 6 isu utama Program KLHK

# Perhutanan Sosial

# Penyerahan SK Perhutanan Sosial

Pada 21 Februari 2020 bertempat di Tahura Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Riau, Presiden menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk 39 SK Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, serta 2 Hutan Adat pada 9 kabupaten dan 10 KPH Provinsi Riau.

Total SK yang diberikan yakni sebanyak 41 untuk 41 kelompok dengan total luas lahan 73.670 hektare bagi 20.890 kepala keluarga (KK).

SK perhutanan sosial yang diserahkan tersebut ada yang dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan adat, dengan rincian:

- ❑ Bengkalis 583 hektare bagi 237 KK
- ❑ Indragiri Hilir 7.664 hektare bagi 3.503 KK,
- ❑ Kampar 6.825 hektare bagi 1.536 KK serta hutan adat seluas 408 hektare,
- ❑ Kepulauan Meranti 10.695 hektare bagi 2.469 KK,
- ❑ Kuantan Singingi 4.731 hektare bagi 1.089 KK.
- ❑ Pelalawan 14.815 hektare bagi 13.566 KK,
- ❑ Rokan Hilir 2.126 hektare bagi 1.120 KK,
- ❑ Rokan Hulu Selatan 17.243 hektare bagi 3.245 KK,
- ❑ Siak 3.580 hektare bagi 520 KK

# Penyerahan SK Perhutanan Sosial

Pada 21 Februari 2020 bertempat di Tahura Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Riau, Presiden menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk 39 SK Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, serta 2 Hutan Adat pada 9 kabupaten dan 10 KPH Provinsi Riau.

Menteri LHK menyampaikan bahwa sampai dengan Februari 2020 pemberian akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial mencapai 4,062 Juta Ha, dengan jumlah SK Izin/hak 6.464 SK bagi 821.371 Kepala Keluarga (KK)

Untuk pengakuan dan penetapan hutan adat seluas 35.150 Ha yang tersebar dalam 65 Masyarakat hukum adat dengan 36.438 Kepala Keluarga dan Indikatif hutan adat seluas 915.004 Hektar terdapat di 22 provinsi dan 48 kabupaten.

Untuk hutan sosial yang sudah ada di Riau sebanyak 108 ribu Ha dari potensi 1,05 juta hektar.

# Penyerahan SK Perhutanan Sosial

Pada 21 Februari 2020 bertempat di Tahura Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Riau, Presiden menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk 39 SK Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, serta 2 Hutan Adat pada 9 kabupaten dan 10 KPH Provinsi Riau.

Pada periode 2020-2024, untuk seluruh Indonesia seluas 4 juta hektar dari target 12,7 juta hektar

Masyarakat yang telah mendapatkan izin diberikan pendampingan agar mendapat manfaat dengan pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Saat ini sudah terbentuk 6.940 KUPS dengan kelas Pemula sebanyak 4521 KUPS, kelas Lanjut sebanyak 1.937 KUPS, kelas Maju sebanyak 435 KUPS dan kelas Mandiri sebanyak 47 KUPS.

Sesuai dengan program pemerataan ekonomi bahwa pemberian akses kelola kawasan hutan akan didampingi oleh penyuluh/KPH untuk peningkatan kapasitas dan kemudahan akses untuk pembiayaan pelaksanaan agroforestry dan pasar.



# Penyerahan SK Perhutanan Sosial

Pada 21 Februari 2020 bertempat di Tahura Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Riau, Presiden menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk 39 SK Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, serta 2 Hutan Adat pada 9 kabupaten dan 10 KPH Provinsi Riau.

Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan kepada seluruh Gubernur dan Bupati agar mengkoordinasikan perangkat daerah terkait guna mendukung Perhutanan Sosial melalui:

- ❑ optimalisasi peran kelompok kerja percepatan Perhutanan Sosial dalam pendampingan,
- ❑ Pengintegrasian program kedalam dokumen pembangunan daerah (RPJMD),
- ❑ Peningkatan kolaborasi perangkat daerah terkait melalui keterpaduan program dan kegiatan,
- ❑ peningkatan peran UPTD KPH dalam pengelolaan hutan ditingkat tapak,
- ❑ Peningkatan keterlibatan stakeholder pemerintah dan non pemerintah dalam pemasaran berikut kemudahan akses permodalan.

# Penyerahan SK Perhutanan Sosial

Pada 21 Februari 2020 bertempat di Tahura Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Riau, Presiden menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk 39 SK Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, serta 2 Hutan Adat pada 9 kabupaten dan 10 KPH Provinsi Riau.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menyepakati untuk menangani 100 desa lokasi Perhutanan Sosial di Pulau Jawa yang akan diperkuat kelembagaan bisnisnya dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta dengan Kementerian BUMN dalam pemasaran produk-produk Perhutanan Sosial.

Dari sisi permodalan, masyarakat bisa memanfaatkan program KUR yang bunganya hanya enam persen per tahun. Di mana sebelumnya bunganya 22 persen, dan saat ini sudah disubsidi pemerintah.

# Penyerahan SK Perhutanan Sosial

Pada 21 Februari 2020 bertempat di Tahura Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Riau, Presiden menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk 39 SK Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, serta 2 Hutan Adat pada 9 kabupaten dan 10 KPH Provinsi Riau.

Presiden meminta kelompok masyarakat yang sudah menerima Surat Keputusan (SK) perhutanan sosial untuk dapat mengelolanya secara produktif. Jika tidak, Presiden mengancam akan mencabut SK tersebut kembali.

Agar produktif, masyarakat bisa menanam komoditas seperti karet, kopi, dan hasil hutan kayu lainnya. Diperlukan juga penerapan sistem agroforestry dengan mengombinasikan pohon berkayu minimal 50% dan sisanya untuk tanaman penghidupan atau pangan. Selain mengejar produktivitas,

Presiden juga mengingatkan, agar pemanfaatan lahan perhutanan sosial ini juga ramah lingkungan. Karena ada kejadian di Pulau Jawa, lahan perhutanan sosial hanya ditanami sayuran sehingga terjadi longsor akibat tidak ada penahan tanah.

## Sumber Pemberitaan

- <https://makassar.terkini.id/presiden-jokowi-serahkan-sk-perhutanan-sosial-dan-hutan-adat-untuk-rakyat-riau/>
- <https://riaupos.co/224714-berita-jokowi-ingin-tol-permai-siap-lebih-cepat.html>
- [http://riaugreen.com/view/Kampar/48199/Kampar-Terima-6-825-Ha-SK-Perhutanan-Sosial-dari-Presiden-RI.html#.XIJv-LhS\\_SE](http://riaugreen.com/view/Kampar/48199/Kampar-Terima-6-825-Ha-SK-Perhutanan-Sosial-dari-Presiden-RI.html#.XIJv-LhS_SE)
- <https://indonesiainside.id/news/2020/02/21/presiden-jokowi-serahkan-sk-perhutanan-sosial-dan-hutan-adat-untuk-rakyat-riau>
- <https://www.jpnn.com/news/presiden-bagikan-sk-perhutanan-sosial-dan-hutan-adat-untuk-masyarakat-riau?page=3>
- <https://www.goriau.com/berita/baca/bagi-73670-hektar-untuk-20890-kk-di-riau-presiden-jokowi-tanam-tanaman-yang-produktif.html>
- <https://www.antaranews.com/berita/1303926/klhk-indonesia-berkontribusi-pengendalian-perubahan-iklim-2030>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200218/257/1202986/indonesia-siapkan-laporan-upaya-pengurangan-penurunan-emisi>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/berikan-izin-hutan-sosial-jokowi-ancam-bila-ada-penelantaran?page=all>
- <https://regional.kompas.com/read/2020/02/21/22435501/serahkan-sk-perhutanan-sosial-jokowi-kalau-sudah-diberi-segera-manfaatkan>
- <https://riaupos.co/224561-berita-serahkan-39-sk-perhutanan-sosial-dan-2-sk-hutan-adat.html>
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/291661-hutan-sosial-harus-produktif>
- <https://www.jpnn.com/news/menteri-siti-nurbaya-beber-6-isu-utama-program-klhk?page=2>



# **LULUK'S UPDATE**

**EDISI**  
**Minggu IV Februari 2020**

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN  
BERSAMA LULUK ULIAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**

# Madani